**ANALISIS PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KOTA
MEDAN**

Rizki Arif Putra¹, M. Arif Nasution², Agus Suriadi³

¹Jl. T.M. Hanafiah No 1. Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara

²Jl. Dr. Sofyan No 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

³Jl. Dr. Sofyan No 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Email: rizkiarif@student.usu.ac.id

ABSTRAK

Di saat perbankan menghadapi kesulitan untuk mencari debitur yang tidak bermasalah, UMK menjadi alternatif penyaluran kredit perbankan. Industri kecil yang ada di Kota Medan mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan penyebaran lokasi industri yang mendukung pembangunan, pemerataan kesempatan kerja, dan bertujuan untuk membentuk masyarakat industri kecil yang mandiri, tangguh, dan berkembang menjadi industri besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan industri kecil di kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sejumlah aktivitas produktif yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan kelemahan pelaku industri kecil menengah untuk meluaskan jejaring eksternal.

Kata kunci: Analisis, Pemerintah, Industri Kecil, Kota Medan.

ABSTRACT

At a time when banking is facing difficulties to make the debtor which is not problematic, UMK became an alternative credit channeling of banking. There is little industry in the city of Medan have a very strategic role, both in the Equalization of opportunities, equitable spread of the Interest of the industry that supports the development, employment equity, and aims to form indentations the Community industry is small, independent, tough, and developed into a major industry. This research aims to analyze the role of the Service industry and are experts in developing small industries in the city of Medan. This research uses descriptive qualitative approach method. Results of the study showed a number of productive activities performed by the Department of industry and experts and the weakness of the perpetrators of the small and medium industries to expand the network of eksternal.

Key words: analysis, Government, industrial city of Medan.

PENDAHULUAN

Kontribusi Industri Kecil dan Menengah di Indonesia pada tahun 2006 bila digambarkan dalam angka Produk Domestik Bruto (PDB) pertumbuhannya mencapai 5,4 persen. Nilai PDB industri kecil dan menengah atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.778,7 triliun meningkat sebesar Rp 287,7 triliun dari tahun 2005 yang nilainya sebesar 1.491,2 triliun. Industri kecil dan menengah memberikan kontribusi 53,3 persen dari total PDB Indonesia. Bila dirinci menurut skala usaha, pada tahun 2006 kontribusi Industri Kecil dan Menengah sebesar 37,7 persen, industri kecil sebesar 15,6 persen, dan industri besar sebesar 46,7 persen. Pada tahun 2006 jumlah populasi industri kecil dan menengah mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98 persen terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang (Gilang M, 2009:14).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:

Dalam upaya mendukung dinamika tersebut Indonesia telah menjalankan suatu kebijakan pokok dalam pemberdayaan usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Industri Kecil adalah pengembanganketerkaitan antara usaha besar, menengah dan usaha kecil dalam polakemitraan usaha yang saling membutuhkan, memperkuat, danmenguntungkan. Peran pemerintah dalam pemberdayaan untukkebijaksanaan pengembangan usaha kerajinan dan industri rumah tangga,menyarankan industri rumah tangga untuk diselaraskan dengan pemanfaatanpotensi sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, sumber dayaalam dan nilai-nilai budaya daerah setempat yang ditempuh melaluipembinaan berbagai sentra usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalamhal ini yang menangani yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Industri kecil yang ada di Kota Medan mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan penyebaran lokasi industri yang mendukung pembangunan, pemerataan kesempatan kerja, dan bertujuan untuk membentuk masyarakat industri kecil yang mandiri, tangguh, dan berkembang menjadi industri besar. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, bahwa perkembangan sektor industri kecil di Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga tahun 2010 sedangkan pada tahun 2011 hingga tahun 2012 mengalami penurunan sekitar 13%. Berdasarkan data perkembangan ini, maka dapat menjadi bahan evaluasi atas pembinaan industri kecil yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya dalam membina pelaku industri kecil, yaitu melalui kegiatan pelatihan, promosi, bantuan dana bergulir, bantuan sarana produksi, magang, studi banding, namun upaya pembinaan tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau serta mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku Industri Kecil selama ini. Permasalahan mendasar untuk sektor industri kecil dan menengah di Kota Medan adalah seringnya terhambat dengan keterbatasan modal, SDM yang masih kurang mampu, kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, dan sulitnya pemasaran khususnya produk kerajinan. Oleh karena itu perlu adanya terobosan-terobosan dari pihak pemerintah melalui instansi teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan untuk melakukan pembinaan secara kontinyu dan berkelanjutan agar Industri Kecil tetap bertahan dan berkembang.

Iklim dan daya saing investasi di Kota Medan juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMK). Perlu diketahui bahwa Usaha kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian Kota Medan. Jumlah UKMK di Kota Medan pada tahun 2008 diperkirakan sebanyak 160.000 usaha dan dari jumlah tersebut sebanyak 24.465 usaha merupakan usaha mikro dan kecil yang tersebar di wilayah Kota Medan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengusaha besar hanya 0,2% sedangkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi mencapai hampir 500 kali lipat dari jumlah usaha besar. Namun kontribusi UKMK terhadap PDRB sebesar 39,8% sedangkan usaha besar mencapai 60,2%.

Hal ini menjadi tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sektor perindustrian yang berupaya untuk membina industri kecil agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal yang ada dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri maupun factor eksternal yang ada diluar Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut.

Berkenaan dengan upaya pembinaan industri kecil di Kota Medan perlu dilakukan pembinaan sesuai bidang usaha yang dijalankan selama ini. Disamping itu perlunya pengembangan kemampuan sumber daya manusia, karena melalui pembinaan tersebut diharapkan berkembangnya usaha industri kecil di Kota Medan. Dalam upaya pembinaan industri kecil dan menengah memang diperlukan suatu langkah yang tepat sehingga permasalahan yang mengemuka dapat teratasi, dan harapan para pengusaha industri kecil untuk sejahtera dapat terealisasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih mendalam, mengingat Kota Medan memiliki potensi dan memiliki peluang yang besar untuk berkembangnya industri kecil. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap fenomena yang terjadi diobyek penelitian

terutama mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam mengembangkan industri kecil. Kemudian dapat diketahui pula faktor-faktor yang menghambat terhadap pembinaan industri kecil yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka tindakan yang paling tepat dan teruji validitasnya dapat dilakukan melalui pendekatan ilmiah/penelitian lapangan.

KAJIAN TEORI

Industri

Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*). Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Dumairy, 1996, hlm.110).

Pengertian kedua kata industri sering disebut sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Menurut Hadikusumo (1990, hlm.23) pengertian industri adalah suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang (produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir), termasuk disini memasang bahagian dari suatu barang (*assembling*).

Ketika satu negara telah mencapai tahapan dimana sektor industri sebagai *leading sector* maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi (Yustika, 2000, hlm.62). Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja.

Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai *leading sector*.

Berdasarkan pengalaman di hampir semua negara, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun.

Di Indonesia *terminology industry* diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Dijelaskan bahwa jenis / macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku :

- 1) Industri ekstraktif
Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar.
Contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.
- 2) Industri nonekstraktif
Industri nonekstraktif adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.
- 3) Industri fasilitatif

Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya.

Contoh : Asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.

Industri Kecil

Belum ada batasan mutlak tentang industri kecil yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum. Menurut Winardi (1994, hlm.67) industri kecil adalah usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa misalnya transportasi, atau jasa perhubungan yang menggunakan modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif kecil. Batasan normatif menurut SK. Menperindag Nomor 254 Tahun 1997, Industri kecil diartikan sebagai suatu kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri kecil tergolong usaha kecil. Oleh karena itu perlu batasan yang tegas tentang pengertian usaha kecil. Hal ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi pemahaman atas kedua konsep tersebut. Menurut UU. Nomor 9 Tahun 1995 yang dimaksud usaha kecil adalah suatu usaha yang mempunyai kekayaan bersih maksimum 200 juta rupiah di luar tanah dan bangunan atau mempunyai omzet penjualan maksimum 1 miliar rupiah per tahun.

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah suatu kegiatan usaha industri yang memiliki asset sampai dengan 5 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan serta beromzet sampai dengan 25 miliar rupiah per tahun (Mayer, 1996, hlm.78). Industri kecil adalah kegiatan untuk mengubah bentuk secara mekanis dan kimiawi produk baru yang lebih tinggi manfaatnya, baik dengan menggunakan mesin, tenaga kerja atau alat bantu lainnya guna dijual atau dipergunakan sendiri. Dengan kata lain, industri adalah kegiatan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang lebih tinggi nilainya (Rhodant, 1993, hlm.104).

Menurut Deperindag bersama dengan Badan Pusat Statistik (2002) industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 miliar rupiah atau kurang. Merujuk kepada beberapa pengertian industri yang telah diuraikan tersebut, maka pada prinsipnya industri itu terkait dengan unsur-unsur tertentu, antara lain:

- a. Kelompok-kelompok perusahaan atau kelompok produksi yang mengolah barang homogen atau sejenis.
- b. Perubahan wujud fisik suatu benda, baik melalui proses mekanik maupun kimia dengan melibatkan faktor-faktor produksi.
- c. Orientasi kegiatan industri dititikberatkan kepada dua target yang mendasar, yakni 1) untuk mendapatkan manfaat/nilai yang lebih tinggi dari semula, dan 2) sebagai jawaban alternatif atas kelangkaan suatu produk dengan cara substitusi.

Pertimbangan lain yang mendasari pentingnya industri kecil, meliputi :

- a. Proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integrasi kegiatan sektor-sektor ekonomi yang lain.
- b. Potensi penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pengangguran.
- c. Dalam jangka panjang, peranannya sebagai suatu basis pembangunan ekonomi yang mandiri.

Penjabaran mengenai potensi pengembangan industri kecil di Indonesia dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja setidaknya memberikan gambaran tentang perihwal yang sama bagi sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan. Data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (2002) memberikan gambaran bahwa kemampuan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil jumlah lebih besar jika dibandingkan dengan industri besar jika dibandingkan dengan industri besar dan sedang.

Irzan (1996, hlm.98) berpendapat bahwa dimensi problematik yang menyangkut persoalan kesempatan kerja, betapapun terbatasnya akan melahirkan suatu urgensi kerja guna memberikan prioritas tersendiri pada pengembangan industri kecil. Untuk itulah sikap pemerintah yang meletakkan sub sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga sebagai kantong dari berbagai upaya

perluasan dan penciptaan lapangan kerja, merupakan keharusan dalam menentukan tindakan yang rasional.

Dalam rangka menunjang pembangunan disektor industri, pemerintah tidak hanya memperhatikan pertumbuhan industri besar dan sedang saja, melainkan juga membantu berkembangnya industri kecil dan rumah tangga. Industri kecil dan rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan, khususnya negara-negara yang sedang membangun, karena industri ini dapat membuka lapangan kerja yang luas, membuka kesempatan usaha dan memperluas basis pembangunan. Dalam berbagai bidang, industri kecil dan rumah tangga juga meningkatkan ekspor. Dalam pembentukan PDRB, peranan industri kecil dan rumah tangga sebenarnya tidaklah terlalu besar, bahkan dapat dikatakan sangat kecil. Akan tetapi peranan sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar.

Sementara itu UKM (Usaha Kecil Menengah) meliputi usaha kecil informal/ tradisional dan juga usaha menengah, yang mengelola usahanya sudah lebih maju jika dibandingkan dengan industri kecil informal dan tradisional. Disamping itu juga dari segi permodalan juga sudah lebih besar dan manajemen juga lebih maju. Upaya pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan, yaitu dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga sektor industri terutama sektor industri UKM dapat terus tumbuh dan berkembang, seiring dengan majunya industri besar. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan industri berdasarkan tujuan perekonomian serta kebijaksanaan ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan nasional, perluasan kesempatan kerja, pembagian pendapatan secara merata, perkembangan industri regional, serta pengurangan jumlah pengangguran.

Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi

Industrialisasi sebenarnya merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain, pembangunan industri itu merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti pula sebagai suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian dapat diusahakan secara “vertikal” semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi dan sekaligus secara “horizontal” semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi penduduk yang semakin bertambah.

Banyak pendapat muncul bahwa industri itu mempunyai peranan penting sebagai sektor pemimpin (*leading sector*). Sektor pemimpin ini maksudnya adalah dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor jasa pun berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran/periklanan, dan sebagainya, yang kesemuanya itu nanti akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Seperti diungkapkan sebelumnya, berarti keadaan menyebabkan meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kenaikan pendapatan dan peningkatan permintaan (daya beli) tersebut menunjukkan bahwa perekonomian itu tumbuh sehat.

UNIDO (*United Nations for Industrial Development Organization*) mengelompokkan negara-negara sebagai berikut (Muhammad, 1992, hlm.57) :

1. Kelompok negara non-industri apabila sumbangan sektor industri terhadap PDB kurang dari 10 persen.
2. Kelompok negara dalam proses industrialisasi apabila sumbangan tersebut antara 10-20 persen.
3. Kelompok negara semi industrialisasi jika sumbang tersebut antara 20-30 persen.
4. Kelompok negara industri jika sumbangan tersebut lebih dari 30 persen.

Perroux mengatakan, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti pendapat Perroux dalam (Muhammad, 1992, hlm.57) adalah sebagai berikut :

1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri pemimpin yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri pemimpin akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri pemimpin tersebut.
2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya.
3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri pemimpin atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

METODE

Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pelaku industri kecil yang dijadikan informan melalui pelaksanaan wawancara mengenai peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dan faktor penghambat dalam pengembangan industri kecil. Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait dalam penelitian ini, seperti Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan ataupun beberapa dokumen terkait yang juga telah tersedia pada instansi pemerintahan lainnya.

PEMBAHASAN

Demografi kota Medan

Secara geografis, Kota Medan diperkirakan terletak diantara :2°.27' - 2°.47' Lintang Utara dan 98°.35' - 98°.44' Bujur Timur. Kota Medan memiliki luas 26.510 Hektar atau 265,10 Km² atau sama dengan 3,6 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, selain memiliki modal dasar pembangunan dengan jumlah penduduk dan letak geografis serta peranan regional yang relatif terus berkembang semakin besar dan strategis, namun Kota Medan juga memiliki keterbatasan ruang sebagai bagian dari dayadukung lingkungan kota.

Luas Kota Medan dapat dikatakan relatif kecil dibandingkan dengan luasan beberapa kota besar lainnya secara regional/nasional. Keterbatasan ruang lebih dirasakan karena bentuk wilayah administratif Kota Medan yang sangat ramping di tengah, sehingga secara alami dapat menjadi tantangan penghambat pengembangan perkotaan ke wilayah utara, khususnya di bidang penyediaan sarana prasarana kota. Kondisi tersebut juga menyebabkan cenderung kurang seimbang dan terintegrasinya ruang kota di Bagian Utara dengan Bagian Selatan. Namun demikian, sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga Kota Metropolitan baru di Indonesia, Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara regional/internasional di kawasan barat Indonesia.

Kota Medan pada saat ini sedang mengalami masa transisi demografi yang ditunjukkan dengan adanya proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian relatif tinggi menuju keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penurunan tingkat kelahiran tersebut adalah perubahan pola pikir masyarakat dan perubahan kemajuan secara sosial ekonomi. Disisi lain adanya faktor perbaikan gizi, kesehatan yang semakin memadai juga mempengaruhi tingkat kematian.

Selanjutnya, jika dicermati ciri ekonomi daerah yang ada, transformasi struktural ekonomi Kota Medan hingga tahun 2011 tidak terjadi secara signifikan dalam rentang waktu yang lama tetapi tetap didominasi subsektor tersier sebesar 70,92 persen, subsektor sekunder sebesar 26,57 persen dan

perolehan dari sector primer hanya sebesar 2,50 persen. Hal ini dikarenakan memang Kota Medan memang bukan daerah pertanian sehingga struktur PDRB Kota Medan didominasi oleh subsektor tersier. Kualitas perekonomian daerah terkait erat dengan aspek ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Peningkatan kualitas perekonomian daerah seyogyanya dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan menyerap angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang, karena ketersediaan kesempatan kerja yang menjamin perolehan pendapatan. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa struktur atau pola perekonomian Kota Medan telah bergeser dari sektor pertanian (agraris) ke sektor sekunder atau sektor jasa yang merupakan ciri spesifik dari daerah perkotaan. Hal ini sejalan dengan fenomena di daerah perkotaan dimana mata pencaharian penduduk mengarah kepada sektor-sektor non agraris. Gejala ini bisa dipahami karena beberapa faktor yang menyebabkan antara lain luas lahan pertanian di daerah perkotaan sangat sempit sehingga daya serap tenaga kerja sektor pertanian semakin sedikit dan tidak memungkinkan bagi penduduk untuk memiliki lahan pertanian yang cukup luas serta lahan di perkotaan merupakan barang berharga dan bernilai sangat tinggi sehingga dari segi ekonomi dimungkinkan untuk kegiatan sektor lainnya, seperti kawasan industri, pertokoan ataupun permukiman.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam Pengembangan Industri Kecil/Menengah

Industri kecil mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, industri kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.

Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Industri kecil dan menengah Industri kecil dan menengah yang ada di Kota Medan mempunyai posisi yang sangat strategis, baik dalam pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan penyebaran lokasi industri yang mendukung Pembinaan Industri Kecil dan Menengah, pembangunan, pemerataan kesempatan kerja, dan bertujuan untuk membentuk masyarakat industri kecil yang mandiri, tangguh, dan berkembang menjadi industri besar. Kondisi ini akan semakin diperkuat dengan pelaksanaan peran pengembangan, pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan melalui berbagai aktivitas seperti; (1) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan, (2) promosi IKM, (3) Perlindungan konsumen, (4) Pengelolaan dan pengembangan Pasar bagi IKM, dan (5) peran pembinaan untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan.

Hasil penilaian terhadap keseluruhan sub peran Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Medan tersebut sudah menunjukkan hasil perwujudan peran pengembangan IKM yang baik. Meskipun demikian temuan lapangan penelitian juga menggambarkan pentingnya kontinuitas pelaksanaan pembinaan terhadap keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha di Kota Medan

Khususnya yang berkaitan langsung dengan peningkatan daya saing IKM di Kota Medan jika dibandingkan dengan produk dari luar.

Faktor Penghambat dalam Pengembangan Industri Kecil/ Menengah

Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan skala usaha dan skala aktivitas IKM di Kota Medan terletak pada faktor kelembagaan IKM itu sendiri. Faktor ini mempatkan IKM di Kota Medan harus dapat menyesuaikan skala usaha dan skala aktivitas IKM sebagai suatu sistem pengelolaan bisnis pada organisasi bisnis modern. Kelemahan pada faktor kelembagaan ini disebabkan karena rendahnya intensitas pelatihan atau kurangnya motivasi, kurangnya dukungan kebijakan, belum terbentuk kelompok usaha, tidak ada kerjasama pemasaran maupun penyediaan bahan baku, dan kurangnya akses kepada lembaga pemodal, sedangkan dalam skala usahanya, sistem produksi dipengaruhi oleh kualitas SDM yang rendah dan rendahnya kemampuan menghasilkan nilai tambah.

Dengan demikian, untuk mengembangkan industri kecil dan menengah di Kota Medan memerlukan perhatian khusus pada faktor kelembagaan dan skala usaha produksi yang ada. Hambatan ini dapat diminimalisir melalui pelatihan berkesinambungan, kebijakan, kelompok usaha, kerjasama dan peran lembaga pemodal untuk faktor kelembagaan, serta kualitas SDM dan keterampilan atau kemampuan menciptakan nilai tambah melalui inovasi.

Identifikasi terhadap faktor penghambat utama selanjutnya terletak pada masih lemahnya jejaring eksternal IKM di Kota Medan yang ditunjukkan dengan masih minimnya kemitraan dengan pelaku usaha dalam kategori Industri Besar atau kemitraan permodalan dengan pihak lain yang berskala global. Menghadapi persaingan setelah diberlakukannya berbagai kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam hal industri dan perdagangan tentu menuntut adanya pengembangan IKM yang mampu mengatasi hambatan ini. Kemitraan dengan perguruan tinggi dipandang sangat strategis mengingat proses pengikisan dinding kemitraan IKM Kota Medan secara eksternal akan sangat leluasa jika bermitra dengan pihak perguruan tinggi. Telah banyak yang menjadi bukti penyelesaian hambatan seperti ini yang dapat dipahami dalam perwujudan model pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui *science and technology park*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Industri kecil mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Kota Medan. Dalam kerangka upaya ini telah diperankan dengan baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan melalui berbagai aktivitas seperti; (1) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan, (2) promosi IKM, (3) Perlindungan konsumen, (4) Pengelolaan dan pengembangan Pasar bagi IKM, dan (5) peran pembinaan untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan.
2. Dalam hal identifikasi hambatan yang ada dalam upaya pengembangan IKM di Kota Medan terdapat faktor seperti; (1) faktor kelembagaan IKM itu sendiri. Faktor ini mempatkan IKM di Kota Medan harus dapat menyesuaikan skala usaha dan skala aktivitas IKM sebagai suatu sistem pengelolaan bisnis pada organisasi bisnis modern. Kelemahan pada faktor kelembagaan ini disebabkan karena rendahnya intensitas pelatihan atau kurangnya motivasi, kurangnya dukungan kebijakan, belum terbentuk kelompok usaha, tidak ada kerjasama pemasaran maupun penyediaan bahan baku, dan kurangnya akses kepada lembaga pemodal, sedangkan dalam skala usahanya, sistem produksi dipengaruhi oleh kualitas SDM yang rendah dan rendahnya kemampuan menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya (2) masih lemahnya jejaring eksternal IKM di Kota Medan yang ditunjukkan dengan masih minimnya kemitraan dengan pelaku usaha dalam kategori Industri Besar atau kemitraan permodalan dengan pihak lain yang berskala global.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hubeis, M. 1997. *Menuju Industri Kecil Profesional di Era Globalisasi Melalui Pemberdayaan Manajemen Industri. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Manajemen Industri, Fakultas Teknologi Industri*, Institut Pertanian Bogor.
- Ikhsan, A. 2001. *Pola Pembinaan Industri Kecil Menengah; Makalah Seminar Nasional Teknik Industri*“ Peran dan Profesi Pendidikan teknik Industri dalam Mewujudkan Kemandirian Usaha Kecil dan Menengah”. Jakarta.
- Irzan, A. S. 1996. *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*. LP3ES, Jakarta.
- Jumhur, A. A. 2001. *Model Pengembangan Industri Kecil; Makalah Seminar Nasional Teknik Industri*“ Peran dan Profesi Pendidikan teknik Industri dalam Mewujudkan Kemandirian Usaha Kecil dan Menengah”. Jakarta.
- Kurniawan, D. 2009. *Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri kecil di Kota Surabaya. Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Jawa Timur. Tidak Dipublikasikan.
- Mayer, L. Dan J.R. Coleman. 1996. *Organisasi dan Administrasi*. Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Nugroho, I dan R. Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta.
- Rachmawati, E. dan Amir. 2003. *Studi Potensi Industri Kecil di Desa Tertinggal Dalam Rangka Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Kabupaten Banyumas*.
jurnal.ump.ac.id/index.php/EKONOMI/article/download/260/245
- Rangkuti, F. 2000. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Gramedia, Jakarta.
- Rhodant, 1993. *Manajemen sumber Daya Manusia*. California Manajemen.Review.
- Saptana, Sumaryonodan S. Priyatno. 2002. *Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Komoditas Kentang dan Kubis di Wibisono Jawa Tengah*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian.
- Sjaifudian, H. H, D. Maspiyati. 1995. *Strategidan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, PenerbitYayasanAkatiga, Bandung.
- Winardi. 1990. *Tenaga Terampil Masih Terbatas*. Penerbit Media Grafika Jakarta.